



SUMBER BERITA

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Saksi Sebut Kadis Dapat Fee 10 Persen

BENGKULU - Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu, Rabu (8/6) kembali menggelar sidang dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi di Dinas Pendidikan Seluma tahun 2020. Sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Dicky Wahyudi Susanto, SH itu menghadirkan empat saksi untuk mendengarkan keterangannya.

Masing-masing, Kepala UPTD Talo Dinas Pendidikan Seluma, Eta Hartoni, Kepala UPTD Semidang Alas Maras Dinas Pendidikan Seluma, Alinin, serta Satpam kantor Dinas Pendidikan Seluma, Joni Kusriadi, dan pemilik usaha las untuk pembuatan alat cuci tangan di sekolah-sekolah, Pipit Dika Junjuran.

Dalam sidang kemarin, empat saksi memberikan keterangan yang cukup menarik. Dimana mereka mengaku kalau proyek pengadaan laptop dan alat cuci tangan dilakukan semuanya atas perintah alias sudah dikondisikan kepala bidang (Kabid).

Disampaikan saksi Hartoni, ia mengaku kurang paham mengenai peran seorang Kepala UPTD dalam dana BOS afirmasi ini. Ia hanya menjalankan perintah dari atasan saja. "Mengetahui adanya dana BOS Afirmasi ini, saya tahu setelah ditelepon oleh Kasi Kurikulum, Zesman Bajjuri. Pada saat itu beliau memberi informasi bahwa di area Talo ada 20 sekolah yang mendapat aliran Dana BOS Afirmasi," terang Hartoni.

Sehingga pada tahap pendistribusian dana BOS Afimasi ini, Hartoni mengaku hanya ikut membagikan ke sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan. "Saat itu saya diperintahkan Bajjuri untuk membagikan 20 unit laptop ke sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan. Laptop ini diambil di rumah pak Kadis yakni Emzaili. Kemudian bantuan lain yang saya bagikan yakni ada alat cuci tangan, ada printer dan infocus juga," ungkap Hartoni.

Sementara Kepala UPTD Semidang Alas Maras, Alinin dalam kesaksiannya menerangkan, ia ikut serta dalam membagikan laptop bantuan ini ke sekolah-sekolah atas instruksi dari Kasi Kurikulum, Zesman Bajjuri.

untuk upah mengantarkan laptop ke sekolah pada saat itu," jelas Alinin.

Sidang kemudian berlanjut pada pemeriksaan keterangan dari Joni Kusriadi dan Pipit Dika mengenai proses awal pemesanan alat cuci tangan yang kemudian termasuk dalam komponen bantuan yang di bagikan ke sekolah-sekolah. Pembahasan alat cuci tangan ini berawal dari Bajjuri menanyai Joni Kusriadi tentang tempat pembuatan alat cuci tangan, hingga Joni merekomendasikan temannya yakni Pipit Dika kepada Bajjuri.

"Bajjuri menanyai saya mengenai tempat pembuatan alat cuci tangan ini, saat kami di luar kantor, kemudian saya merekomendasikan teman saya Pipit," ungkapny.

Setelah memberi tahu Pipit, kemudian Joni dan Pipit pergi menemui Bajjuri di kantor pada saat itu. "Dua kali saya menemui Bajjuri, hingga terjadi kesepakatan dalam pembuatan alat cuci tangan ini, namun dengan sistem saya diutang dahulu, dan saya sepakati," terang Pipit.

Diketahui, harga perunit dari alat cuci tangan yang dibuat oleh Pipit ada dua jenis harga, yakni untuk alat

cuci tangan SMP Rp 2.750.000 juta dan untuk SD Rp 2.250.000. Pipit juga ikut membagikan ke sekolah-sekolah pada saat itu. Beberapa fakta menarik dari pembuatan alat cuci tangan ini, yakni diawal kesepakatan ternyata terdakwa Emzaili selaku Kepala Dinas Pendidikan Seluma mendapat 10 persen dari setiap keuntungan pembuatan alat cuci tangan ini.

Dan saksi Joni Kusriadi mendapat uang Rp 2 juta dari Pipit usai pengadaan alat cuci tangan ini. Setelah berjalan dua jam, sidang akhirnya ditunda dan akan dilanjutkan pekan dengan agenda pemeriksaan saksi yakni 10 kepala sekolah yang menerima bantuan dana BOS Afirmasi.

Sementara itu, usai persidangan jaksa penuntut umum (JPU), Muhammad Syafii menjelaskan pada sidang kemarin, pihaknya memanggil beberapa saksi yakni dari UPTD dan Swasta. "Kita mendatangkan dua saksi dari UPTD yang kemudian memberikan keterangan mengenai pendistribusian laptop, dan dua orang dari Satpam dan Pemilik las tempat pembuatan alat cuci tangan," jelas Syafii.

Sidang selanjutnya, direncanakan akan mendatangkan 10 saksi dari kepala sekolah. "Selanjutnya akan memanggil saksi dari kepala sekolah, 5 kepala SD, dan 5 orang kepala SMP," katanya.

Sementara itu, Penasihat Hukum terdakwa, Sopian Siregar, SH, MKn mengatakan pihaknya telah meminta kepada Majelis dan JPU untuk menghadirkan kembali dua saksi sebelumnya, yakni Kabid SD, Marwan dan Kasi Kurikulum, Bajjuri untuk di konfrontir guna memperjelas peran masing-masing.

"Setelah kita memeriksa dua saksi terakhir, ternyata perintah untuk membuat, bahkan penyerahan pembayaran pajak dari penjualan alat cuci tangan adalah pak Marwan," terang Sopian.

Menurut Sopian, setelah jelas peran masing-masing dari saksi-saksi, kemudian akan berimbas kepada tuntutan, putusan dan pembelaan pihaknya. "Dan untuk sidang hari ini (kemarin, red) dua klien saya, sama sekali tidak ada mengenal secarta langsung terhadap saksi-saksi," demikian Sopian. **(jam)**